

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN ANGGARAN 2014



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Letnan Amir Kusman No. 2 Bondowoso Telp. 0332-423934
2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan Hidayah-Nya semata, akhirnya Laporan Akuntabilitas Bappeda Kabupaten Bondowoso Tahun 2014, dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan bagian dari tugas Penyelenggara Pemerintahan Negara dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan yang dipercayakan berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis, yang merupakan bagian dari implementasi dari TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhirnya, dengan selesainya penyusunan Laporan Akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso ini disertai dengan harapan, semoga akan menjadi landasan fundamental bagi Bappeda Bondowoso untuk selalu meningkatkan kualitas kerjanya dalam tahun-tahun berikutnya.

Bondowoso, Pebruari 2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah maka secara formal Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang lebih luas sebagai akibat adanya transfer of authority dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah Daerah memiliki keleluasaan dalam penyusunan perencanaan pembangunan berupa penentuan strategi, kebijakan dan program pembangunan serta pengelolaan anggaran. Pemerintah Daerah diharapkan dapat memahami karakteristik daerahnya sendiri sehingga dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah semaksimal dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat lokal.

Transparansi atau keterbukaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah merupakan keinginan masyarakat saat ini. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh masyarakat dan tuntutan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) adalah hal yang wajar. Pemerintah daerah merespon positif terhadap keinginan masyarakat dengan melaksanakan perubahan arah menuju penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik serta melibatkan peran aktif masyarakat dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan.

Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas menjadi kunci sukses dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan tuntutan terwujudnya Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan maka perlu disusun langkah – langkah strategis. Langkah – langkah strategis yang dimaksud adalah rencana-rencana tindakan yang harus dilaksanakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dalam jangka waktu tertentu dengan memperhatikan lingkungan internal dan eksternal daerah serta memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan laporan akuntabilitas instansi pemerintah ini memiliki maksud dan tujuan adalah sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangkukepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.

C. DASAR HUKUM

1. Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara nomor 239 tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan LAKIP;
2. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2009 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. GAMBARAN ORGANISASI

Tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bondowoso didasarkan pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang didalamnya mengatur kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk merumuskan, menyusun, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah serta Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso.

Bappeda merupakan institusi pemerintah yang membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan. Bappeda mempunyai tugas yang sangat kompleks antara lain :

1. Melaksanakan tugas pokok perencanaan yaitu menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan perencanaan pembangunan.
2. Melaksanakan tugas pengendalian yaitu melakukan pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan.
3. Melaksanakan tugas koordinasi yaitu mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkup pemerintah daerah serta instansi vertikal dan badan lain yang berada di pemerintah propinsi maupun pusat.

D.1. KEDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bondowoso, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

D.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso, maka tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan.
2. Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten.
3. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Menengah dan Panjang Daerah yang memuat Visi, Misi dan arah Pembangunan Daerah.
4. Penyusunan rencana dan pengembangan wilayah Bidang Ekonomi, sosial dan budaya serta prasarana wilayah
5. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di bidang Perencanaan Pembangunan
6. Pengkoordinasian dengan instansi dan atau lembaga terkait untuk kepentingan perencanaan pembangunan.
7. Penyusunan dan pengkoordinasian Program Kerjasama dalam dan luar negeri di bidang pembangunan dan investasi daerah.
8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D.3. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan pembangunan Daerah adalah :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat
3. Bidang Ekonomi
4. Bidang Sosial dan Budaya

5. Bidang Prasarana Wilayah
6. Bidang Data dan Penelitian
7. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kepala

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten mempunyai tugas memimpin dalam perumusan perencanaan pembangunan dan mengkoordinasikan program dan melakukan hubungan atau kerjasama dengan instansi lain dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan.

2. Sekretariat,

Dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, dan perencanaan. Fungsi Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah:

- a. Penyusunan rencana kegiatan tahunan.
- b. Pengelolaan urusan keuangan dan gaji pegawai.
- c. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan.
- d. Pelayanan teknis administratif kepada Kepala Badan dan semua unit organisasi di lingkungan Badan.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

3. Bidang Ekonomi,

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari Sub Bidang Pertanian dan Sub Bidang Industri, Dunia Usaha dan Penanaman Modal. Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan dalam urusan koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata, perikanan, perdagangan dan perindustrian. Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan di bidang ekonomi meliputi urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata, perikanan, perdagangan dan perindustrian.
- b. Pengkoordinasian rencana pembangunan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata, perikanan, perdagangan dan perindustrian.

- c. Penyusunan program-program pembangunan bidang ekonomi lintas sektoral dan lintas kecamatan.
 - d. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang ekonomi dan perumusan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya.
 - e. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan penanaman modal.
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan.
4. Bidang Sosial dan Budaya,

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari Sub Bidang Pemerintahan dan Sub Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat. Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dalam urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, mental spiritual, pemerintahan dan aparatur, kesejahteraan rakyat, kependudukan, ketenagakerjaan serta kesehatan masyarakat. Bidang Sosial dan Budaya mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan dalam urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan desa, perencanaan pembangunan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, kepegawaian serta kearsipan.
 - b. Pengkoordinasian dan pemanduan rencana-rencana pembangunan di dalam urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan desa, perencanaan pembangunan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, kepegawaian serta kearsipan oleh dinas-dinas dan satuan organisasi lain yang diusulkan kepada pemerintah propinsi untuk dimasukkan ke dalam program kegiatan pemerintah propinsi dan atau diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan ke dalam program nasional.
 - c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang sosial dan budaya serta perumusan langkah-langkah kebijaksanaan pembangunan.
 - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
5. Bidang Prasarana Wilayah,

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan

dan Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Bidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan dalam urusan pengairan, bina marga, cipta karya, tata ruang, pertambangan, energi, pertanahan, perhubungan, dan lingkungan hidup. Bidang Prasarana Wilayah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan dalam urusan pengairan, bina marga, cipta karya, tata ruang, pertambangan, energi, pertanahan, perhubungan, dan lingkungan hidup.
- b. Pengkoordinasian dan pemanduan rencana-rencana pembangunan di dalam urusan pengairan, bina marga, cipta karya, tata ruang, pertambangan, energi, pertanahan, perhubungan, dan lingkungan hidup. Yang diusulkan kepada pemerintah propinsi untuk dimasukkan ke dalam program kegiatan pemerintah propinsi dan atau diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan ke dalam program nasional.
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang prasarana wilayah serta perumusan langkah-langkah kebijaksanaan pembangunan.
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

6. Bidang Data dan Penelitian,

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari Sub Bidang Pengendalian dan Statistik dan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan. Bidang Data dan Penelitian mempunyai tugas melakukan pengolahan dan pelaporan data/ statistik daerah, melaksanakan pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan dalam urusan penelitian dan pengembangan dengan fungsi :

- a. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan.
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian perencanaan pembangunan.
- c. Pengolahan data dan statistik.
- d. Penyusunan informasi pelaksanaan pembangunan.
- e. Pengumpulan dan penyiapan bahan dalam rangka menyusun perencanaan penelitian
- f. Pelaksanaan Penelitian dan atau kerjasama dengan instansi lain.
- g. Penyusunan laporan dan sosialisasi hasil penelitian
- h. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar bidang dan instansi lain dalam kegiatan penelitian
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Tata Kerja

- a. Semua unit kerja di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- b. Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan berkewajiban memimpin bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- c. Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan wajib melaksanakan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- d. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- e. Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- f. Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan setiap pimpinan unit kerja mengadakan rapat berkala.
- g. Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menurut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 terlampir.

LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Lingkungan strategis yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi lingkungan internal dan eksternal yaitu

1. Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Bappeda terdiri atas faktor kekuatan organisasi dan kelemahan organisasi.

1.1 Faktor Kekuatan Organisasi :

- 1) Adanya sistem perencanaan pembangunan yang memiliki mekanisme yang baik.
- 2) Banyaknya kewenangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan
- 3) Adanya dokumen perencanaan yang dihasilkan yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok
- 4) Adanya dukungan data dan informasi

- 5) Adanya Standart Pelayanan Minimal (SPM) Penanaman Modal
- 6) Adanya struktur kelembagaan yang cukup baik
- 7) Meningkatnya disiplin dan komitmen melaksanakan tugas bagi Pegawai

1.2 Faktor Kelemahan Organisasi :

- 1) Kurangnya wadah peningkatan kemampuan teknis perencanaan pembangunan bagi Pegawai
- 2) Masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas
- 3) Masih kurangnya pemanfaatan Teknologi Informasi yang tersedia
- 4) Belum adanya tenaga fungsional perencana
- 5) Masih kurangnya jumlah pegawai

2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis yang karena *berada pada lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Bappeda Kabupaten Bondowoso namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi*. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi.

2.1 Faktor Peluang Organisasi :

- 1) Adanya dukungan alokasi anggaran
- 2) Banyaknya lembaga teknis dan dinas terkait yang ditangani
- 3) Jumlah usulan program pembangunan yang masuk cukup banyak
- 4) Adanya komitmen baik dari Pemerintah dan Masyarakat akan perlunya akuntabilitas publik
- 5) Adanya wadah organisasi yang terencana (Musrenbang, Sinkronisasi, Rakornas)

2.2 Faktor Ancaman/Tantangan Organisasi :

- 1) Kurangnya penyatuan persepsi terhadap program pembangunan (sektoralistik)
- 2) Terbatasnya anggaran yang tersedia
- 3) Kurangnya peningkatan frekuensi koordinasi
- 4) Belum optimalnya (kualitas dan kuantitas) usulan program / kegiatan secara bottom up
- 5) Belum maksimalnya pemanfaatan secara substansi dokumen perencanaan pembangunan

- 6) Belum maksimalnya pelaksanaan penataruangan wilayah
- 7) Belum Optimalnya Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Penanaman Modal
- 8) Kurangnya optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun pelaporan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan dinas terkait

E. REFORMASI BIROKRASI

F. INOVASI DAN PRESTASI

G. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAKIP

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam kedudukannya sebagai perangkat daerah yang mengurus perencanaan pembangunan di daerah dan dengan memperhatikan tuntutan kinerja dan kualitas aparatur, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diharapkan dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Berdasarkan Keppres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah perlu merumuskan visi dan misi sebagai satu kesatuan dengan rangkaian kebijakan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2014 - 2018

A. RENCANA STRATEGIS SKPD

Visi dan Misi

Dengan memperhatikan arti dan makna visi serta melalui pendekatan membangun visi bersama, maka ditetapkan *visi* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 adalah :“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Terarah dan Terpadu Secara Berkelanjutan”

Perencanaan Pembangunan Daerah yang Terarah

Perencanaan pembangunan daerah yang terarah memiliki makna bahwa :

1. Perencanaan pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan disusun dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebagaimana termaktub dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 - 2018.
2. Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menyelaraskan dengan kerangka dan arah perencanaan pembangunan nasional sehingga pembangunan yang dilaksanakan di daerah dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.
3. Perencanaan pembangunan daerah disusun agar dapat memberikan arah bagi proses pelaksanaan pembangunan di daerah sekaligus sebagai fungsi kontrol dan pengendali pelaksanaan pembangunan.
4. Perencanaan pembangunan daerah disusun agar komponen – komponen daerah sebagai penunjang pembangunan dapat dikembangkan secara optimal yaitu keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan potensi daerah disegala bidang.

Perencanaan Pembangunan Daerah yang Terpadu

Perencanaan pembangunan daerah yang terpadu memiliki makna :

1. Perencanaan pembangunan daerah disusun dengan pendekatan top down dan bottom up system yaitu perencanaan pembangunan disusun dengan mengakomodir usulan dari bawah yaitu para stakeholder dan masyarakat melalui suatu mekanisme tertentu sedangkan pemerintah daerah dalam pelaksanaannya semaksimal mungkin menuangkannya ke dalam rencana kerja pemerintah daerah.
2. Perencanaan pembangunan daerah disusun agar semua sektor pembangunan yang akan dilaksanakan tidak saling tumpang tindih melainkan semua sektor pembangunan dapat saling melengkapi dan mendukung dalam satu kesatuan sistem pembangunan.

Perencanaan Pembangunan Daerah secara Berkelanjutan memiliki makna :

Perencanaan pembangunan yang merupakan kesatuan rangkaian dengan tahapan perencanaan pembangunan sebelumnya dan dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Dalam rangka mewujudkan visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso tersebut ditetapkan misi sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun *misi* yang telah ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Melanjutkan terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Serta Pengendalian Dan pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Yang Berkualitas
2. Melanjutkan terwujudnya Sistem Data Informasi Perencanaan Pembangunan yang akurat
3. Melanjutkan terwujudnya Perencanaan Pembangunan Dan Pemanfaatan Ruang Yang Berwawasan Tata Ruang Wilayah:
4. Melanjutkan terwujudnya Standar Pelayanan Minimal Penanaman Modal yang Optimal
5. Melanjutkan terwujudnya Sarana Dan Prasarana Serta Sumber Daya Aparatur yang berkualitas

Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu-isu daerah yang dihadapi dengan rumusan sebagai berikut :

- a. merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi SKPD dan memiliki keterkaitan dengan misi SKPD yang ingin dicapai.

- b. tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif namun setidaknya memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa akan datang.
- c. harus realistis dan dapat dicapai.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan selamam lima tahun ke depan, dengan memperhatikan beberapa hal antara lain :

- a. Spesifik yaitu sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas
- b. Dapat diukur yaitu sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur
- c. Dapat dicapai yaitu sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada
- d. Relevan yaitu sasaran mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan
- e. Mempunyai batas waktu yaitu pencapaian sasaran ditetapkan
- f. Perbaikan berkelanjutan yaitu Sasaran dapat dicapai secara bertahap

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Untuk mencapai misi, melaksanakan misi dan menangani isu-isu strategis maka sasaran strategis dan indikator kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso dapat digambarkan sebagaimana **Tabel 2.**

Strategi dan Arah Kebijakan SKPD

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah bagi pelayanan dengan prinsip-prinsip :

- a. Menterjemahkan strategi kedalam bentuk operasional
- b. Menyelaraskan organisasi sesuai pilihan strategis jangka menengah
- c. Menjadikan strategi sebagai komitmen dan rutinitas birokrasi
- d. Menjadikan strategi sebagai proses yang berkelanjutan
- e. Memobilisasi perubahan melalui kepemimpinan yang baik

Sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, dimana kebijakan yang dirumuskan harus dapat :

- a. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional
- b. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, fokus, kongrit dan operasional
- c. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran.

- d. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan melanggar kepentingan umum.

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka dapat digambarkan strategi dan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bondowoso sebagaimana **Tabel 2**

Tabel 2

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE				
						1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	MISI 1 : Melanjutkan terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Serta Pengendalian Dan pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Yang Berkualitas.	1. meningkatkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas Serta Pengendalian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Yang Efektif	1.1. Meningkatnya Penyusunan Perencanaan Pembangunan Yang aspiratif, Terintegrasi dan Tepat Waktu	1.1.1 Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan yang dimanfaatkan oleh SKPD 1.1.2 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah 1.1.3. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah 1.1.4 Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah 1.1.5 Penjabaran Program RPJMD Ke Dalam RKPD 1.2.1 Persentase Dokumen Evaluasi dan Pelaporan yang Disusun Tepat Wakt	% Dokumen Dokumen Dokumen Program %	100 Ada Ada Ada 92,1 % 100 (6)	100 Ada Ada Ada 93,6 100 (6)	100 Ada Ada Ada 96,1 100 (6)	100 Ada Ada Ada 98,5 100 (7)	100 Ada Ada Ada 100 100 (7)
2	MISI 2 : Melanjutkan terwujudnya Sistim Data Informasi Perencanaan	1.1 Meningkatkan Mekanisme Pengolahan Data Informasi Perencanaan	1.1.1 Meningkatnya Penyusunan Data Informasi	1.1.1.1 Tersedianya Buku Kabupaten Dalam Angka 1.1.1.2	Dokumen Dokumen	Ada Ada	Ada Ada	Ada Ada	Ada Ada	Ada Ada

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE				
						1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pembangunan yang akurat.	Pembangunan .	1.1.2 Meningkatnya dokumen data dan informasi yang dimanfaatkan SKPD	Tersedianya Buku PDRB Kabupaten 1.1.2.1. % Dokumen Data dan Informasi Yang Dapat Dijadikan Dasar Dalam Perencanaan Pembangunan	%	4	4	4	4	4
3	MISI 3 : Melanjutkan terwujudnya Perencanaan Pembangunan Dan Pemanfaatan Ruang Yang Berwawasan Tata Ruang Wilayah	1. Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Yang Sesuai Dengan Tata Ruang Wilayah.	1 Meningkatnya Penyusunan Kebijakan Perencanaan Tata Ruang Wilayah Yang Berkualitas 1.2 Meningkatnya pemetaan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya 1.3 Meningkatnya Pengawasan	1.1.1 Persentase Dokumen Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso 1.2.1 Persentase dokumen pemetaan pemanfaatan ruang 1.2.2 Rasio Ruang Terbuka Hijau 1.2.3. Rasio Bangunan BerIMB 1.2.4. Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya 1.2.5 Ketaatan Terhadap RTRW 1.2.6 Luas Wilayah Produktif 1.2.7 Luas Wilayah Kebanjiran 1.2.8 Luas Wilayah Kekeringan 1.2.9 Luas Wilayah	% % % % % % % %	20 20 1,38 0,60 5,00 95,00 90,00 5,00 10,00 1,40	40 40 1,39 0,55 5,00 95,00 90,00 5,00 10,00 1,50	60 60 1,39 0,55 5,00 95,00 90,00 5,00 10,00 1,60	80 80 1,40 0,55 5,00 95,00 90,00 5,00 10,00 1,70	100 100 1,40 0,55 5,00 95,00 90,00 5,00 10,00 1,75

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE				
						1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Perkotaan 1.3.1 Persentase Pemanfaatan Ruang Terhadap Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso	%	20	40	60	80	100
4	MISI 4 : Melanjutkan terwujudnya Standar Pelayanan Minimal Penanaman Modal yang Optimal	1. Meningkatkan Pelayanan Publik Urusan Penanaman Modal	1.1. Meningkatnya Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Penanaman Modal 1.2. Meningkatnya Investasi di Daerah	1.1.1 Terselenggaranya Fasilitas Kerjasama Kemitraan 1.1.2.. Terselenggaranya promosi peluang investasi 1.1.3. Meningkatnya jumlah investasi non fasilitas	Kali Kali Milyar Rupiah	1 0 220	1 1 240	1 1 260	1 1 280	1 1 300
5	MISI 5 : Melanjutkan terwujudnya Sarana Dan Prasarana Serta Sumber Daya Aparatur yang berkualitas	1.Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Serta Kemampuan Dan Keterampilan Aparatur Dalam Perencanaan.	1.1. Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran 1.2 Meningkatnya sarana dan Prasarana kantor 1.3. Meningkatnya Kemampuan Aparatur	1.1..1 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 1.2.1 Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana kantor 1.3.1 Meningkatkan Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	Kegiatan Kegiatan Orang	12 4 1	13 5 1	13 4 1	13 5 1	13 5 1

Prioritas Program Pembangunan Tahun 2014

Program pembangunan adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan, Bappeda telah menetapkan indikator kinerja/tolok ukur sebagai alat ukur spesifik yang bersifat kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, keluaran, hasil, manfaat dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program dan kegiatan. Setiap indikator kinerja akan dievaluasi dan dinilai dari pencapaian target/sasaran yang telah ditetapkan. Target yang dimaksud adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Setiap program didukung dengan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Program pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah merupakan juga program prioritas yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan. Rencana program dan kegiatan beserta indikator keluaran program dan pagu indikatif merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bondowoso yang didasari atas strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sedangkan Indikator Keluaran Program adalah merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program yaitu manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari masing-masing kegiatan dalam satu program dan Kelompok sasaran adalah Pihak-pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan program SKPD.

Sebagai Badan yang memiliki tugas dalam bidang perencanaan pembangunan maka prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappeda lebih mengarah pada peningkatan perencanaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pembangunan daerah yang akan dicapai melalui program prioritas :

1. Program Perencanaan Tata Ruang
2. Program Pemanfaatan Ruang
3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
4. Program Pengembangan Data/ Informasi
5. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
7. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
8. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
9. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
10. Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
11. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah
12. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

13. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
14. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya Sarana dan Prasarana Daerah

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014

C.1. Urusan Tata Ruang

Tujuan dari Urusan tata Ruang adalah Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan tata ruang wilayah, dengan sasaran :

- a. terlaksananya penyusunan kebijakan perencanaan tata ruang wilayah yang berkualitas dengan indikator kinerja utama sasaran adalah tersedianya dokumen penataan ruang wilayah kabupaten bondowoso.
 - b. terlaksananya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan indikator kinerja utama meningkatkan pemanfaatan ruang terhadap tata ruang wilayah kabupaten bondowoso
- 1 Program Perencanaan Tata Ruang, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
- a Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
 - b Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan TRBL

Sasaran/target dari Program Perencanaan Tata Ruang ditetapkan dengan tolok ukur kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	FORMULA INDIKATOR	SAT UAN	THN DASAR 2013	%	TARGET									
					2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Persentase Jumlah Dokumen RTR Kawasan Strategis Tersusun	Σ Kumulatif Dok RTR yang Dihasilkan <u>sampai dengan Tahun Berjalan</u> Σ Dokumen RTR yang direncanakan hingga tahun 2018	dok	$\frac{4}{4}$	100	$\frac{1}{5}$	20	$\frac{2}{5}$	40	$\frac{3}{5}$	60	$\frac{4}{5}$	80	$\frac{5}{5}$	100

2. Program Pemanfaatan Ruang

Sasaran/target dari Program Pemanfaatan Ruang ditetapkan dengan tolok ukur kinerja sebagaimana tabel berikut :

Indikator Capaian Program Pemanfaatan Ruang

NO	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	FORMULA INDIKATOR	SATUAN	%	TARGET									
					2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase Dokumen Pemetaan Pemanfaatan Ruang Tersusun	Σ Kumulatif Dokumen Pemetaan Pemanfaatan Ruang yang Dihasilkan s / d Tahun Berjalan Σ Dokumen Pemetaan Pemanfaatan Ruang yang Direncanakan Hingga Tahun 2018	dok	0	$\frac{1}{5}$	20	$\frac{2}{5}$	40	$\frac{3}{5}$	60	$\frac{4}{5}$	80	$\frac{5}{5}$	100
2	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/ HGB	Luas RTH	ha	1,38	<u>1.482,02</u>	1,38	<u>1.492,76</u>	1,39	<u>1.492,76</u>	1,39	<u>1.503,50</u>	1,40	<u>1.503,50</u>	1,40
		Luas Wilayah Ber HPL/HGB			107.392,60		107.392,60		107.392,60		107.392,60		107.392,60	
3	Rasio Bangunan Ber IMB per Satuan Bangunan	Jumlah Bangunan Ber IMB	unit	0,55	<u>86.832</u>	0,60	<u>79.000</u>	0,55	<u>79.000</u>	0,55	<u>79.000</u>	0,55	<u>79.000</u>	0,55
		Jumlah Bangunan Ber IMB			144.720		144.000		144.000		144.000		144.000	
4	Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya	Jumlah Ruang Publik Yang Berubah Fungsi	ha	0,00	<u>3.510,00</u>	5,00	<u>3.510,00</u>	5,00	<u>3.510,00</u>	5,00	<u>3.510,00</u>	5,00	<u>3.510,00</u>	5,00
		Jumlah Ruang Publik Yang tersedia			70.204,50		70.204,50		70.204,50		70.204,50		70.204,50	
5	Ketaatan terhadap RTRW	Realisasi RTRW	ha	98,08	<u>148.210,00</u>	95	<u>148.210,00</u>	95	<u>148.210,00</u>	95	<u>148.210,00</u>	95	<u>148.210,00</u>	95
		Rencana Peruntukan RTRW			156.010,00		156.010,00		156.010,00		156.010,00		156.010,00	
6	Luas Wilayah Produktif	Jumlah Luas Wilayah Produktif	ha	92,43	<u>96.653,00</u>	90	<u>96.653,00</u>	90	<u>96.653,00</u>	90	<u>96.653,00</u>	90	<u>96.653,00</u>	90
		Jumlah Luas Seluruh Wilayah Budidaya			107.392,60		107.392,60		107.392,60		107.392,60		107.392,60	
7	Luas Wilayah Industri	Jumlah Luas Wilayah Industri	ha	0,03	<u>54,00</u>	0,05	<u>107,00</u>	0,10	<u>161,00</u>	0,15	<u>215,00</u>	0,20	<u>322,00</u>	0,30
		Jumlah Luas Seluruh Wilayah Budidaya			107.392,60		107.392,60		107.392,60		107.392,60		107.392,60	

8	Luas Wilayah Kebanjiran	<u>Jumlah Luas Wilayah Kebanjiran</u>	ha	0,00	<u>5.370,00</u>	5,00	<u>5.370,00</u>	5,00	<u>5.370,00</u>	5,00	<u>5.370,00</u>	5,00	<u>5.370,00</u>	5,00
		Jumlah Luas Seluruh Wilayah Budidaya			107.392,60		107.392,60		107.392,60		107.392,60		107.392,60	
9	Luas Wilayah kekeringan	<u>Jumlah Luas Wilayah Kekeringan</u>	ha	5,59	<u>10.739,00</u>	10	<u>10.739,00</u>	10	<u>10.739,00</u>	10	<u>10.739,00</u>	10	<u>10.739,00</u>	10
		Jumlah Luas Seluruh Wilayah Budidaya			107.392,60		107.392,60		107.392,60		107.392,60		107.392,60	
10	Luas Wilayah Perkotaan	<u>Jumlah Luas Wilayah Perkotaan</u>	ha	1,35	<u>1.503,00</u>	1,40	<u>1.611,00</u>	1,50	<u>1.718,00</u>	1,60	<u>1.826,00</u>	1,70	<u>1.879,00</u>	1,75
		Jumlah Luas Seluruh Wilayah Budidaya			107.392,60		107.392,60		107.392,60		107.392,60		107.392,60	
11	Persentase Laporan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang secara Kontinyu tersusun	Σ Laporan Pengawasan dan Pengendalian <u>Pemanfaatan Ruang s / d Tahun Berjalan</u> Σ Laporan Tahunan yang Direncanakan Hingga Tahun 2018	dok	20	<u>1</u> 5	20	<u>2</u> 5	40	<u>3</u> 5	60	<u>4</u> 5	80	<u>5</u> 5	100

3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang , dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Sasaran/target dari Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang ditetapkan dengan tolok ukur kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	FORMULA INDIKATOR	SAT UAN	TAHU N DASA R 2013	%	TARGET									
					2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Persentase Laporan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang secara Kontinyu tersusun	$\frac{\Sigma \text{Laporan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang s / d Tahun Berjalan}}{\Sigma \text{Laporan Tahunan yang Direncanakan Hingga Tahun 2018}}$	dok	$\frac{0}{0}$	0	$\frac{1}{5}$	20	$\frac{2}{5}$	40	$\frac{3}{5}$	60	$\frac{4}{5}$	80	$\frac{5}{5}$	100

Tolok ukur capaian kinerja Program Perencanaan Tata Ruang, Program Pemanfaatan Ruang dan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang bersifat kumulatif dari tahun ke tahun sehingga target kinerja yang diukur selalu meningkat secara kuantitatif . Kegiatan perencanaan tata ruang yang dilakukan setiap tahun akan terus ditambahkan secara agregat pada tahun – tahun yang akan datang.

C.2. Urusan Perencanaan Pembangunan

Tujuan urusan perencanaan pembangunan daerah adalah meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas serta pengendalian pelaporan pelaksanaan pembangunan yang efektif, dengan sasaran :

- a. terlaksananya penyusunan perencanaan pembangunan yang aspiratif, terintegrasi dan tepat waktu dengan indikator kinerja utama sasaran tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan SKPD dalam menyusun dokumen rencana pembangunan SKPD.
 - b. Terlaksananya pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah dengan indikator kinerja utama sasaran tersedianya dokumen evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah
1. Program Pengembangan Data/Informasi, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Profile Daerah
 - b. Penyusunan Kabupaten dan Kecamatan Dalam Angka
 - c. Pengembangan Data Publikasi

Sasaran/target dari Program Pengembangan Data/Informasi ditetapkan dengan tolok ukur kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	FORMULA INDIKATO R	SAT UAN	TAH UN DAS AR 2013	%	TARGET									
					2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
% data / informasi yg digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan	Σ data / informasi yg siap digunakan untuk <u>penyusunan dokumen perencanaan</u> an Σ data / informasi yang wajib disusun tiap tahun	dok	$\frac{4}{4}$	100	$\frac{2}{2}$	100	$\frac{2}{2}$	100	$\frac{2}{2}$	100	$\frac{2}{2}$	100	$\frac{2}{2}$	100

Dokumen yang ditetapkan sebagai tolok ukur capaian kinerja dalam setiap tahunnya adalah : Tersusunnya Dokumen Profile Tahunan Daerah Kabupaten Bondowoso, Dokumen Kabupaten Bondowoso dalam Angka dan Dokumen Kecamatan dalam Angka.

2. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan
 - b. Penyebarluasan Informasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Sasaran/target dari Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan dengan tolok ukur kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	FORMULA INDIKATOR	SAT UAN	TAH UN DAS AR 2013	%	TARGET									
					2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Σ aparatur yg mengikuti sosialisasi / bimbingan teknis	<u>Σ aparatur yg mengikuti sosialisasi / Bimtek perencanaan pembangunan</u> Jumlah Aparatur yang direncanakan mengikuti Bimtek/Sosialisasi tiap tah	org	$\frac{460}{460}$	100	$\frac{120}{120}$	100	$\frac{120}{120}$	100	$\frac{120}{120}$	100	$\frac{120}{120}$	100	$\frac{240}{240}$	100

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan perencanaan pembangunandalam kapasitas kelembagaan melalui kegiatan-kegiatan bimbingan teknis/pelatihan yang diikuti oleh aparatur pada masing-masing SKPD. Tolok ukurnya adalah jumlah aparatur SKPD yang mengikuti kegiatan-kegiatan bimbingan teknis dalam setiap tahunnya.

3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Rancangan RKPD, RPJMD dan RPJPD
- b. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD, RPJMD dan RPJPD
- c. Kordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
- d. Kordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
- e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- f. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK
- g. Penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
- h. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program/Kegiatan SKPD
- i. Finalisasi dan Sosialisasi RPJMD

Sasaran/target dari Program Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan dengan tolok ukur kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	FORMULA INDIKATOR	SAT UAN	TAH UN DAS AR 2013	%	TARGET									
					2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
% Ketersediaan dokumen perencanaan yang dimanfaatkan SKPD	$\frac{\sum \text{dok perencanaan yang dimanfaatkan SKPD}}{\sum \text{dok perencanaan yang wajib disusun tiap tahun}}$	dok	$\frac{7}{7}$	100	$\frac{8}{8}$	100	$\frac{7}{7}$	100	$\frac{7}{7}$	100	$\frac{7}{7}$	100	$\frac{8}{8}$	100
Ketepatan waktu Penyusunan LAKIP, LKPJ	$\frac{\text{Realisasi } \sum \text{hari penyusunan LAKIP, LKPJ}}{\sum \text{hari yang direncanakan dalam menyusun LAKIP, LKPJ}}$	hari	$\frac{90}{90}$	100	$\frac{90}{90}$	100	$\frac{90}{90}$	100	$\frac{90}{90}$	100	$\frac{90}{90}$	100	$\frac{90}{90}$	100
Persentase Dokumen Evaluasi dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	$\frac{\sum \text{dok evaluasi yang disusun tepat waktu}}{\sum \text{dokumen evaluasi yang disusun tiap tahun}}$	dok	$\frac{4}{4}$	100	$\frac{4}{4}$	100	$\frac{4}{4}$	100	$\frac{4}{4}$	100	$\frac{4}{4}$	100	$\frac{5}{5}$	100
Ketepatan waktu penetapan RKPD, KU dan PPAS	$\frac{\sum \text{dok RKPD, KU dan PPAS yang disusun tepat waktu}}{\sum \text{dok RKPD, KU dan PPAS yang tersusun tiap tahun}}$	dok	$\frac{6}{6}$	100	$\frac{6}{6}$	100	$\frac{6}{6}$	100	$\frac{6}{6}$	100	$\frac{6}{6}$	100	$\frac{6}{6}$	100

Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah	Ada / Tidak	Dok	Ada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah	Ada / Tidak	Dok	Ada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah	Ada / Tidak	Dok	Ada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Penjabaran Program RPJMD Ke Dalam RKPD	Jumlah Program RKPD Tahun Berkenaan Jumlah Program RPJMD Yang Harus Dilaksanakan Tahun Berjalan	Program	149 162	91,9	187 203	92,1	190 203	93,6	195 203	96,1	203	98,5	203 203	100

4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
 - Pendukung Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program/ APP)
 - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Pangan dan Gizi

Sasaran/target dari Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi ditetapkan dengan tolok ukur kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	FORMULA INDIKATOR	S A T U A N	T A H U N D A S A R 2013	%	TARGET									
					2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
% Master plan bidang ekonomi yang digunakan untuk perencanaan	Master plan bidang ekonomi yang digunakan untuk perencanaan Master plan bidang ekonomi yang telah disusun	m. plan	2 2	100	2 2	100	2 2	100	2 2	100	2 2	100	2 2	100

% Peningkatan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	<u>Σ Koord yang Dilaksanakan Setiap Tahun</u> <u>Σ Koord yang Direncanakan Setiap Tahun</u>	kali	<u>9</u> 9	100	<u>9</u> 9	100	<u>9</u> 9	100	<u>9</u> 9	100	<u>9</u> 9	100	<u>9</u> 9	100,
--	--	------	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	------

5. Program Perencanaan Sosial Budaya, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
- b. Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
- c. Koordinasi Pendukung Kegiatan USAID
- d. Koordinasi Pendukung Kegiatan UNICEF
- e. Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
- f. Koordinasi Tim Pembina Kabupaten Sehat
- g. Koordinasi Pendamping Kegiatan Quick Wins
- h. Rencana Aksi Daerah Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Anak
- i. Analisis Pengembangan SMK Berbasis Produksi

Sasaran/target dari Program Perencanaan Sosial Budaya ditetapkan dengan

tolok ukur kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	FORMULA INDIKATOR	SATUAN	TAHUN DASAR 2013	%	TARGET									
					2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
% Master plan bidang sosial budaya yang digunakan untuk perencanaan	<u>Master plan bidang sosial budaya yang digunakan untuk perencanaan</u> Master plan bidang sosial budaya yang telah disusun	m. plan	$\frac{2}{2}$	100	$\frac{2}{2}$	100	$\frac{2}{2}$	100	$\frac{2}{2}$	100	$\frac{2}{2}$	100	$\frac{2}{2}$	100
% Peningkatan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	<u>Σ Koord yang Dilaksanakan Setiap Tahun</u> <u>Σ Koord yang Direncanakan Setiap Tahun</u>	kali	$\frac{9}{9}$	100	$\frac{9}{9}$	100	$\frac{9}{9}$	100	$\frac{9}{9}$	100,	$\frac{9}{9}$	100	$\frac{9}{9}$	100

6. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
- b. Penyusunan Masterplan Prasarana Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
- c. Pendamping Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP)
- d. Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
- e. Program Pendamping Water Resources and Irrigation Sector Management Program 2 (WISMP-2)
- f. Koordinasi Pelaksanaan P2D2 DAK Infrastruktur

Sasaran/target dari Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam ditetapkan dengan tolok ukur kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	FORMULA INDIKATOR	SAT UAN	TAHU N DASA R 2013	%	TARGET									
					2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Persentase Masterplan Prasarana Wilayah dan Pengelolaan SDA tersusun	Σ Kumulatif Dok Masterplan yang Dihasilkan s / d Tahun Berjalan Σ Masterplan yang Direncanakan sampai Tahun 2018	m. plan	$\frac{2}{2}$	100	$\frac{1}{5}$	20	$\frac{2}{5}$	40	$\frac{3}{5}$	60	$\frac{4}{5}$	80	$\frac{5}{5}$	100
% Master plan prasarana wilayah dan pengelolaan sumber daya alam yang Digunakan untuk Perencanaan	Master plan prasarana wilayah dan pengelolaan sumber daya alam yang digunakan untuk perencanaan Master plan prasarana wilayah dan pengelolaan sumber daya alam yang tersusun s/d tahun 2018	m. plan	$\frac{2}{2}$	100	$\frac{1}{5}$	20	$\frac{2}{5}$	40	$\frac{3}{5}$	60	$\frac{4}{5}$	80	$\frac{5}{5}$	100
Persentase Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah Yang Dilaksanakan	Σ Koord yang Dilaksanakan Selama 1 tahun Σ Koord yang Direncanakan Selama 1 Tahun	Kali	$\frac{1}{1}$	100	$\frac{9}{9}$	100	$\frac{9}{9}$	100	$\frac{9}{9}$	100	$\frac{9}{9}$	100	$\frac{9}{9}$	100

7. Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
 - a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - b. Penerbitan Buletin Warta Litbang
 - c. Kajian Pemanfaatan teknologi Tepat Guna di UMKM
 - d. Fasilitasi Dewan Riset Daerah

Sasaran/target dari Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan ditetapkan dengan tolok ukur kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	FORMULA INDIKATOR	SAT UA N	TAH UN DAS AR 2013	%	TARGET									
					2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Persentase Penelitian dan Pengembangan yang Dilakukan	$\frac{\Sigma \text{ Penelitian dan Pengembangan yang Dilakukan}}{\Sigma \text{ penelitian dan pengembangan yang akan dilakukan selama 5 tahun}}$	Kajian	$\frac{3}{3}$	100	$\frac{1}{5}$	20	$\frac{2}{5}$	40	$\frac{3}{5}$	60	$\frac{4}{5}$	80	$\frac{5}{5}$	100

8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- g. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- i. Penyediaan Makanan dan Minuman
- j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- k. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
- l. Penyediaan Informasi Hasil Aparatur Kepada Masyarakat

Sasaran/target dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ditetapkan dengan tolok ukur kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Capaian Program	Formula Indikator Capaian Program	Satu an	2014		2015		2016		2017		2018	
1	Meningkatnya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Kegiatan yang Direncanakan}}$	Kegiatan / Kegiatan	$\frac{13}{13}$	100%	$\frac{13}{13}$	100%	$\frac{13}{13}$	100%	$\frac{13}{13}$	100%	$\frac{13}{13}$	100%

Sebagai upaya untuk mencapai peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, Bappeda telah menetapkan untuk periode 5 (lima) tahun ke depan program ini akan didukung dengan 12 kegiatan dalam setiap tahunnya sekaligus jumlah kegiatan ini menjadi tolok ukur keberhasilan dalam program ini.

9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
 - g. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

Sasaran/target dari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ditetapkan dengan tolok ukur kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Capaian Program	Formula Indikator Capaian Program	Satuan	2014		2015		2016		2017		2018	
				7/7	100%	7/7	100%	7/7	100%	7/7	100%	7/7	100%
1	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan Jumlah Kegiatan yang Direncanakan	Kegiatan / Kegiatan	7/7	100%	7/7	100%	7/7	100%	7/7	100%	7/7	100%

Ketersediaan sarana prasarana yang memadai diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur dan meningkatkan tugas penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Dalam setiap tahunnya ditetapkan 7 (tujuh) kegiatan sebagai target keberhasilan program ini.

10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Penyusunan Prognosis Keuangan

Sasaran/target dari Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ditetapkan dengan tolok ukur kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Capaian Program	Formula Indikator Capaian Program	Satuan	2014		2015		2016		2017		2018	
				2/2	100%	2/2	100%	2/2	100%	2/2	100%	2/2	100%
1	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Sistematis	Jumlah Dokumen yang dimanfaatkan Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dok Dok	2/2	100%	2/2	100%	2/2	100%	2/2	100%	2/2	100%

Dokumen yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan dalam setiap tahunnya adalah : Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Keuangan Semester I dan II.

C.3. Urusan Penanaman Modal

Tujuan dari urusan penanaman modal adalah meningkatkan pelayanan publik urusan penanaman modal dengan sasaran terlaksananya pelaksanaan standar pelayanan minimal penanaman modal dengan indikator kinerja utama sasaran adalah Terselenggaranya Fasilitasi Kerjasama Kemitraan, Terselenggaranya promosi peluang investasi dan Meningkatnya jumlah investasi non fasilitasi

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
 - a. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

Sasaran/target dari Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi ditetapkan dengan tolok ukur kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	FORMULA INDIKATOR	SATUAN	TAHUN DASAR 2013	%	TARGET									
					2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terselenggaranya Fasilitasi Kerjasama Kemitraan	Σ Penyelenggaraan Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Setiap Tahun	kali	0	Kali	1	KI	1	KI	1	KI	1	KI	1	KI
Terselenggaranya Promosi Peluang Investasi	Penyelenggaraan Promosi Peluang Investasi	kali	0	Kali	0	KI	1	KI	1	KI	1	KI	1	KI

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengembangan Simpedal
 - b. Peningkatan Fasilitasi terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah
 - c. Penyusunan Recana Umum Penanaman Modal

Sasaran/target dari Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi ditetapkan dengan tolok ukur kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	FORMULA INDIKATOR	SATUAN	TAHUN DASAR 2013	%	TARGET									
					2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor / Bidang Usaha Unggulan Tiap Tahun	Sektor / Bidang Usaha Per Tahunnya Informasi peluang Sektor / Bidang Usaha yang dilakukan s/d Tahun 2018	sektor	0,00	0	$\frac{1}{5}$	20	$\frac{2}{5}$	40	$\frac{3}{5}$	60	$\frac{4}{5}$	80	$\frac{5}{5}$	100

Σ Investasi Non Fasilitas	Σ Investasi Non Fasilitas Tahun Ybs Σ Investasi Non Fasilitas Tahun Dasar	miliar Rp	200	100	220	110	240	120	260	130	280	140	300	150
---------------------------	---	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

a. Kajian Potensi Sumberdaya yang terkait dengan Investasi

Sasaran/target dari Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah ditetapkan dengan tolok ukur kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	FORMULA INDIKATOR	SATUAN	TAHUN DASAR 2013	%	TARGET									
					2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Persentase Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi tersusun	$\frac{\Sigma \text{ kajian potensi sumberdaya yang terkait dgn investasi}}{\Sigma \text{ kajian potensi sumberdaya yang terkait dgn investasi yang dilakukan s/d 2018}}$	dok dok	2	100	$\frac{1}{8}$	12,5	$\frac{2}{8}$	25	$\frac{4}{8}$	50	$\frac{6}{8}$	75	$\frac{8}{8}$	100

C.4. Urusan Statistik

Tujuan dari urusan statistik adalah meningkatkan mekanisme pengolahan data informasi perencanaan pembangunan dengan sasaran terlaksananya penyusunan data informasi yang akurat dengan indikator kinerja utama sasara adalah tersedianya dokumen data dan informasi yang dapat dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan.

1. Program Pengembangan Data Informasi/ Statistik Daerah, dengan uraian kegiatan sebagai berikut
 - a. Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB
 - b. Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia
 - c. Pemuktahiran (Up Date) Data Masyarakat Miskin

Sasaran/target dari Program Pengembangan Data Informasi/ Statistik Daerah ditetapkan dengan tolok ukur kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	FORMULA INDIKATOR	SATUAN	TAHUN DASAR 2013	%	TARGET									
					2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tersedianya Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada/Tidak	Dok	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada	
Tersedianya Buku PDRB Kabupaten	Ada/Tidak	Dok	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada	

% data / informasi yg digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan	Σ data / informasi yg siap digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan <u>perencanaan</u> Σ data / informasi yang terkumpul wajib disusun tiap tahun	dok	$\frac{10}{10}$	100	$\frac{2}{2}$	100	$\frac{2}{2}$	100	$\frac{2}{2}$	100	$\frac{2}{2}$	100	$\frac{2}{2}$	100
--	---	-----	-----------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----

D. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

1. Program Perencanaan Tata Ruang

Sasaran dari program ini adalah tersusunnya perencanaan pembangunan daerah sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dengan indikator kinerja sasaran tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah dan persentase dokumen perencanaan yang dimanfaatkan SKPD dengan kegiatan

- a. Penetapan Kebijakan tentang RDTR, RTRK dan RTBL
- b. Penyusunan RDTR Kawasan

2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Sasaran dari program ini adalah tersusunnya perencanaan pembanguna daerah sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dengan indikator kinerja sasaran tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah dan persentase dokumen perencanaan yang dimanfaatkan SKPD dengan kegiatan

- a. Pengawasan Pemanfaatan Ruang

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sasaran dari program ini adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dengan indikator sasaran meningkatnya sarana dan prasarana yang tersedia yaitu :

- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- c. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- d. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
- e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- f. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- g. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- h. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- i. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
- j. Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- k. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
- l. Kegiatan Penyediaan Informasi Hasil Aparatur Kepada Masyarakat

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Sasaran dari program ini adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dengan indikator sasaran meningkatnya sarana dan prasarana yang tersedia dengan kegiatan :
 - a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
 - f. Rehabilitasi Berat/Sedang Gedung Kantor
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Sasaran dari program ini adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dengan indikator sasaran meningkatnya sarana dan prasarana yang tersedia dengan kegiatan :
 - a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6. Program Pengembangan Data/Informasi
Sasaran dari program ini adalah meningkatnya intensitas koordinasi dengan SKPD dalam penyediaan data dan informasi serta tersusunnya data informasi yang akurat dengan indikator sasaran meningkatnya koordinasi dengan SKPD dan tersedianya data dan informasi yang dapat dijadikan dasar penyusunan perencanaan pembangunan dengan kegiatan :
 - a. Kegiatan Penyusunan Profile Daerah
 - b. Kegiatan Penyusunan Kabupaten dan Kecamatan Dalam Angka
 - c. Pengembangan Data Publikasi
7. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan pembangunan Daerah dengan kegiatan :
Sasaran dari program ini adalah tersusunnya perencanaan pembanguna daerah sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dengan indikator kinerja sasaran tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah dan persentase dokumen perencanaan yang dimanfaatkan SKPD dengan kegiatan
 - a. Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

- b. Penyebarluasan Informasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- Sasaran dari program ini adalah tersusunnya perencanaan pembangunan daerah sebagai dasar pelaksanaan pembangunan, terserapnya aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah, terlaksananya program perencanaan pembangunan daerah dan tersusunnya dokumen evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah dengan indikator kinerja sasaran tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah, persentase dokumen perencanaan yang dimanfaatkan SKPD, terselenggaranya penjangkauan aspirasi masyarakat, meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi serta tersedianya dokumen laporan evaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan yang akuntabel, dengan kegiatan :
- a. Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
 - c. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
 - d. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
 - e. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 - f. Kegiatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK
 - g. Kegiatan Penyusunan KU dan PPAS
 - h. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program/Kegiatan SKPD
 - i. Finalisasi dan Sosialisasi RPJMD
 - j. Fasilitasi Monev RAD PPK
9. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- Sasaran program ini adalah terlaksananya koordinasi yang selaras dan serasi antara perencanaan pembangunan di daerah dengan propinsi dan nasional dengan indikator sasaran adalah terlaksananya dokumen usulan yang berjenjang dan meningkatnya fungsi koordinasi perencanaan pembangunan daerah secara vertikal dan horizontal dengan kegiatan :
- a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
 - b. Kegiatan Pendukung Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program/ APP)
 - c. Penyusunan Rencana Aksi Daerah dan Monev Pembangunan Pangan dan Gizi
10. Program Perencanaan Sosial Budaya

Sasaran program ini adalah terlaksananya koordinasi yang selaras dan serasi antara perencanaan pembangunan di daerah dengan propinsi dan nasional dengan indikator sasaran adalah terlaksananya dokumen usulan yang berjenjang dan meningkatnya fungsi koordinasi perencanaan pembangunan daerah secara vertikal dan horizontal dengan kegiatan :

- a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
- b. Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
- c. Pendukung USAID
- d. Fasilitasi TKPKD
- e. Tim Pembina Kabupaten Sehat
- f. Pendamping Kegiatan Quick Wins
- g. RAD Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi
- h. Analisis Pengembangan SMK Berbasis Produksi

11. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Sasaran program ini adalah terlaksananya koordinasi yang selaras dan serasi antara perencanaan pembangunan di daerah dengan propinsi dan nasional dengan indikator sasaran adalah terlaksananya dokumen usulan yang berjenjang dan meningkatnya fungsi koordinasi perencanaan pembangunan daerah secara vertikal dan horizontal dengan kegiatan :

- a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
- b. Kegiatan Pendamping Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP)
- c. Penyusunan Masterplan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
- d. Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
- e. Program WISMP 2
- f. Koordinasi Pelaksanaan P2D2 Infrastruktur

12. Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Sasaran program ini adalah terlaksananya koordinasi yang selaras dan serasi antara perencanaan pembangunan di daerah dengan propinsi dan nasional dengan indikator sasaran adalah terlaksananya dokumen usulan yang berjenjang dan meningkatnya fungsi koordinasi perencanaan pembangunan daerah secara vertikal dan horizontal dengan kegiatan :

- a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - b. Penerbitan Buletin Warta Litbang
 - c. Kajian Pemanfaatan Teknologi Tepat Gunas di UMKM
 - d. Fasilitasi Dewan Riset Daerah
13. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
- Sasaran dari program ini adalah meningkatnya intensitas koordinasi dengan SKPD dalam penyediaan data dan informasi serta tersusunnya data informasi yang akurat dengan indikator sasaran meningkatnya koordinasi dengan SKPD dan tersedianya data dan informasi yang dapat dijadikan dasar penyusunan perencanaan pembangunan dengan kegiatan :
- a. Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB
 - b. Penyusunan Inkesra
 - c. Pemukthairan (Up Date) Data Masyarakat Miskin
14. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- Sasaran dari program ini adalah tersusunnya perencanaan pembangunan daerah sebagai dasar pelaksanaan pembangunan, terserapnya aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah, terlaksananya program perencanaan pembangunan daerah dan tersusunnya dokumen evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah dengan indikator kinerja sasaran tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah, persentase dokumen perencanaan yang dimanfaatkan SKPD, terselenggaranya penjangkaran aspirasi masyarakat, meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi serta tersedianya dokumen laporan evaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan yang akuntabel, dengan kegiatan :
- a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
15. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- a. Pengembangan Simpedal
 - b. Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan Kecil Menengah
 - c. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal
16. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah
- Sasaran dari program ini adalah tersusunnya perencanaan pembangunan daerah sebagai dasar pelaksanaan pembangunan, terserapnya aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah, terlaksananya program perencanaan pembangunan daerah dan tersusunnya dokumen evaluasi pelaksanaan pembangunan

daerah dengan indikator kinerja sasaran tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah,persentase dokumen perencanaan yang dimanfaatkan SKPD,terselenggaranya penjangkaran aspirasi masyarakat,meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi serta tersedianya dokumen laporan evaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan yang akuntabel, dengan kegiatan :

- a. Kegiatan Kajian Potensi Sumber Daya yang Terkait Investasi

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO

A. PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengetahui kinerja instansi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bondowoso melakukan penilaian kinerja tahun 2014. Penilaian kinerja ini dimulai dengan menentukan indikator kinerja dan variabelnya. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Indikator *inputs* (masukan) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator *outputs* (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa keluaran fisik atau non fisik. Indikator *outcomes* (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator *benefits* (manfaat) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Sedangkan indikator *impacts* (dampak) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan penilaian kinerja dengan menggunakan piranti formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) dan PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran) sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2014

B.1. Data Capaian Kinerja Tahun 2013

Penilaian kinerja diperoleh dari pengukuran kinerja program/kegiatan tahun 2013, sebagai berikut :

B.1. Urusan Tata Ruang

a. Program Perencanaan Tata Ruang

Pencapaian Indikator Kinerja
Program Perencanaan Tata Ruang Tahun 2013

No	Indikator Program	Data Keberhasilan Pembangunan	
		Target/Sasaran	Realisasi
1	Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis	1 Dokumen	1 Dokumen

b. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pencapaian Indikator Kinerja
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tahun 2013

No	Indikator Program	Data Keberhasilan Pembangunan	
		Target/Sasaran	Realisasi
1	Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Ruang	88 %	88 %

B.2. Urusan Perencanaan Pembangunan

a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Pencapaian Capaian Indikator Kinerja
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2013

No	Indikator Program	Data Keberhasilan Pembangunan	
		Target/Sasaran	Realisasi
1	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan yang Dimanfaatkan SKPD	100% (10 Dokumen)	100% (10 Dokumen)
2	Ketepatan Waktu Penyusunan LAKIP dan LKPJ	100% (90 Hari)	100% (90 Hari)
3	Ketersediaan Dokumen Evaluasi	100% (7 Dokumen)	100% (7 Dokumen)
4	Ketepatan Waktu Penetapan RKPD Daerah	100% (9 Dokumen)	111% (10 Dokumen)

b. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Pencapaian Indikator Kinerja
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tahun 2013

No	Indikator Program	Data Keberhasilan Pembangunan	
		Target/Sasaran	Realisasi
1	Persentase Masterplan Penanggulangan Kemiskinan Yang Digunakan Untuk Perencanaan	100 % (1 Dokumen)	100 % (1 Dokumen)
2	Persentase Masterplan Ekonomi Daerah yang digunakan untuk perencanaan	100 % (1 Dokumen)	100 % (1 Dokumen)
4	Meningkatnya Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi	100%	100%

c. Program Perencanaan Sosial Budaya

Pencapaian Indikator Kinerja
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Tahun 2013

No	Indikator Program	Data Keberhasilan Pembangunan	
		Target/Sasaran	Realisasi
1	Persentase Masterplan Pendidikan yang digunakan untuk perencanaan	100 % (1 Dokumen)	100 % (1 Dokumen)
2	Persentase Masterplan Kesehatan yang digunakan untuk perencanaan	100 % (1 Dokumen)	100 % (1 Dokumen)
3	Meningkatnya Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya.	100%	100%

d. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Pencapaian Indikator Kinerja
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Tahun 2013

No	Indikator Program	Data Keberhasilan Pembangunan	
		Target/Sasaran	Realisasi
1	Persentase Masterplan Prasarana Wilayah dan Pengelolaan Sumberdaya Alam	1 Dokumen	1 Dokumen

2	Persentase Masterplan Masterplan Prasarana Wilayah dan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang digunakan untuk perencanaan	100 % (1 Dokumen)	100 % (1 Dokumen)
3	Meningkatnya Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah.	100%	100%

e. Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Pencapaian Indikator Kinerja
Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2013

No	Indikator Program	Data Keberhasilan Pembangunan	
		Target/Sasaran	Realisasi
1	Persentase Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan	100 % (1 Dokumen)	0 % (0 Dokumen)

f. Program Pengembangan Data/Informasi

Pencapaian Indikator Kinerja
Program Pengembangan Data/Informasi Tahun 2013

No	Indikator Program	Data Keberhasilan Pembangunan	
		Target/Sasaran	Realisasi
1	Persentase Data/Informasi yang Siap Digunakan untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan	100% (3 Dokumen)	100% (3 Dokumen)

g. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pencapaian Indikator Kinerja
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2013

No	Indikator Program	Data Keberhasilan Pembangunan	
		Target/Sasaran	Realisasi
1	Meningkatnya Aparatur yang Mengikuti Sosialisasi/Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan	240 Orang	100 % (240 Orang)

- h. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pencapaian Indikator Kinerja
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tahun 2013

No	Indikator Program	Data Keberhasilan Pembangunan	
		Target/Sasaran	Realisasi
1	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan secara Sistematis	2 Dokumen	2 Dokumen

- i. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pencapaian Indikator Kinerja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2013

No	Indikator Program	Data Keberhasilan Pembangunan	
		Target/Sasaran	Realisasi
1	Meningkatnya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100% (12 Kegiatan)	100% (12 Kegiatan)

- j. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pencapaian Indikator Kinerja
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun 2013

No	Indikator Program	Data Keberhasilan Pembangunan	
		Target/Sasaran	Realisasi
1	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100% (6 Kegiatan)	100% (6 Kegiatan)

- k. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pencapaian Indikator Kinerja
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sumber Daya Aparatur
Tahun 2013

No	Indikator Program	Data Keberhasilan Pembangunan	
		Target/Sasaran	Realisasi
1	Meningkatnya Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	5 Orang	100% (5 Orang)

C.3. Urusan Statistik

a. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Pencapaian Indikator Kinerja
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Tahun 2013

No	Indikator Program	Data Keberhasilan Pembangunan	
		Target/Sasaran	Realisasi
1	Persentase Data/Informasi yang Siap Digunakan untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan	100% (3 Dokumen)	100 % (3 Dokumen)

c.4. Urusan Penanaman Modal

a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Pencapaian Indikator Kinerja

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Tahun 2013

No	Indikator Program	Data Keberhasilan Pembangunan	
		Target/Sasaran	Realisasi
1	Persentase Meningkatnya pelaksanaan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	100%	100%

b. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasaran Daerah

Pencapaian Indikator Kinerja

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Saranan dan Prasana Tahun 2013

No	Indikator Program	Data Keberhasilan Pembangunan	
		Target/Sasaran	Realisasi
1	Persentase Kajian Potensi Sumberdaya yang terkait dengan Investasi	1 Kajian	1 Kajian

B.2. Target Kinerja, Realisasi Kinerja, Nilai Capaian Tahun 2014 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2018

I. capaian indikator kinerja utama(sasaran)

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	NILAI CAPAIAN (%)	KATEGORI	TARGET AKHIR RPJMD (2018)
1	2	3	4	5	6					
1.	MISI 1 : Melanjutkan terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Serta Pengendalian Dan pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Yang Berkualitas.	1. Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas Serta Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Yang Efektif	1.1. Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Pembangunan Yang aspiratif, Terintegrasi dan Tepat Waktu	1.1.1 Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan yang dimanfaatkan oleh SKPD dalam menyusun Dokumen Rencana Pembangunan SKPD	Dokumen	8	12	225		37
			1.2 Terlaksananya Pengendalian Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Dengan Optimal	1.2.1 Tersedianya Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	6	6	100		31
2	MISI 2 : Melanjutkan terwujudnya Sistim Data Informasi Perencanaan Pembangunan yang akurat.	1. Meningkatkan Mekanisme Pengolahan Data Informasi Perencanaan Pembangunan .	1.1. Terlaksananya Penyusunan Data Informasi Yang Akurat.	1.1.1. Tersedianya Dokumen Data dan Informasi Yang Dapat Dijadikan Dasar Dalam Perencanaan Pembangunan	Dokumen	4	4	100		20

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	NILAI CAPAIAN (%)	KATA GORI	TARGET AKHIR RPJMD (2018)
1	2	3	4	5	6					
3	MISI 3 : Melanjutkan terwujudnya Perencanaan Pembangunan Dan Pemanfaatan Ruang Yang Berwawasan Tata Ruang Wilayah	1. Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Yang Sesuai Dengan Tata Ruang Wilayah.	1.1 Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Perencanaan Tata Ruang Wilayah Yang Berkualitas 1.2 Terlaksananya pemetaan pemanfaatan ruang 1.3 Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dengan Optimal	1.1.1 Tersedianya Dokumen Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso 1.2.1 Tersedianya dokumen pemetaan pemanfaatan ruang 1.3.1 Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Terhadap Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso	Dokumen Dokumen Dokumen	1 0 1	1 0 1	100 0 100		5 4 5
4	MISI 4 : Melanjutkan terwujudnya Standar Pelayanan Minimal Penanaman Modal yang Optimal	1. Meningkatkan Pelayanan Publik Urusan Penanaman Modal	1.1. Terlaksananya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Penanaman Modal	1.1.1 Terselenggaranya Fasilitasi Kerjasama Kemitraan 1.1.2.. Terselenggaranya promosi peluang investasi 1.1.3. Meningkatnya jumlah investasi non fasilitasi	Kali Kali Milyar Rupiah	1 1 220	1 1 846	100 100 423		5 4 300

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	NILAI CAPAIAN (%)	KATEGORI	TARGET AKHIR RPJMD (2018)
1	2	3	4	5	6					
5	MISI 5 : Melanjutkan terwujudnya Sarana Dan Prasarana Serta Sumber Daya Aparatur yang berkualitas	1. Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Serta Kemampuan Dan Keterampilan Aparatur Dalam Perencanaan.	1.1 Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Pelayanan Administrasi Dan Perkantoran. 1.2. Meningkatnya Kemampuan dan Keterampilan Aparatur Perencana	1.1.1 Tersedianya Sarana Dan Prasarana Kantor	Kegiatan	20				98
				1.2.1 Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan Dan Keterampilan	Orang	1				5

II. capaian indikator kinerja program

INDIKATOR CAPAIAN	TARGET		REALISASI		NILAI CAPAIAN	TARGET AKHIR RPJMD (2018)	
	target	%	realisasi	%		target	%
Persentase Jumlah Dokumen RTR Kawasan Strategis Tersusun	$\frac{1}{5}$	20	$\frac{1}{5}$	20	100%	$\frac{5}{5}$	100
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/ HGB	$\frac{1.482,02}{107.392,60}$	1,38	$\frac{1.482,02}{107.392,60}$	1,38	100%	$\frac{1.503,50}{107.392,60}$	1,40
Rasio Bangunan Ber IMB per Satuan Bangunan	$\frac{86.832}{144.720}$	0,60	$\frac{86.832}{144.720}$	0,60	100%	$\frac{79.000}{144.720}$	0,55
Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya	$\frac{3.510,00}{70.204,50}$	5,00	$\frac{3.510,00}{70.204,50}$	5,00	100%	$\frac{3.510,00}{70.204,50}$	5
Ketaatan terhadap RTRW	$\frac{148.210,00}{156.010,00}$	95	$\frac{148.210,00}{156.010,00}$	95	100%	$\frac{148.210,00}{156.010,00}$	95

Luas Wilayah Produktif	$\frac{96.653,00}{107.392,60}$	90	$\frac{96.653,00}{107.392,60}$	90	100%	$\frac{96.653,00}{107.392,60}$	90
Luas Wilayah Industri	$\frac{54,00}{107.392,60}$	0,05	$\frac{54,00}{107.392,60}$	0,05	100%	$\frac{322,00}{107.392,60}$	0,30
Luas Wilayah Kebanjiran	$\frac{5.370,00}{107.392,60}$	5,00	$\frac{5.370,00}{107.392,60}$	5,00	100%	$\frac{5.370,00}{107.392,60}$	5
Luas Wilayah kekeringan	$\frac{10.739,00}{107.392,60}$	10	$\frac{10.739,00}{107.392,60}$	10	100%	$\frac{10.739,00}{107.392,60}$	10
Luas Wilayah Perkotaan	$\frac{1.503,00}{107.392,60}$	1,40	$\frac{1.503,00}{107.392,60}$	1,40	100%	$\frac{1.879,00}{107.392,60}$	1,75
Persentase Laporan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang secara Kontinyu tersusun	$\frac{1}{5}$	20	$\frac{1}{5}$	20	100%	$\frac{5}{5}$	100
% data / informasi yg digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan	$\frac{2}{2}$	100	$\frac{2}{2}$	100	100%	$\frac{2}{2}$	100
Σ aparaturnya yg mengikuti sosialisasi / bimbingan teknis	$\frac{120}{120}$	100	$\frac{275}{120}$	225%	225%	$\frac{720}{120}$	600
% Ketersediaan dokumen perencanaan yang dimanfaatkan SKPD	$\frac{8}{8}$	100	$\frac{12}{8}$	150%	150%	$\frac{8}{8}$	100
Ketepatan waktu Penyusunan LAKIP, LKPJ	$\frac{90}{90}$	100	$\frac{90}{90}$	100	100%	$\frac{90}{90}$	100
Persentase Dokumen Evaluasi dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	$\frac{4}{4}$	100	$\frac{4}{4}$	100	100%	$\frac{5}{5}$	100
Ketepatan waktu penetapan RKPD, KU dan PPAS	$\frac{6}{6}$	100	$\frac{6}{6}$	100	100%	$\frac{6}{6}$	100

Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah	Ada		Ada			Ada	
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah	Ada		Ada			Ada	
Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah	Ada		Ada			Ada	
Penjabaran Program RPJMD Ke Dalam RKPD	$\frac{187}{203}$	92,1	$\frac{178}{203}$	87,68	95,20%	$\frac{203}{203}$	100
% Master plan bidang ekonomi yang digunakan untuk perencanaan	$\frac{2}{2}$	100	$\frac{2}{2}$	100	100%	$\frac{2}{2}$	100
% Peningkatan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	$\frac{9}{9}$	100	$\frac{9}{9}$	100	100%	$\frac{9}{9}$	100
% Master plan bidang sosial budaya yang digunakan untuk perencanaan	$\frac{2}{2}$	100	$\frac{2}{2}$	100	100%	$\frac{2}{2}$	100
% Peningkatan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	$\frac{9}{9}$	100	$\frac{9}{9}$	100	100%	$\frac{9}{9}$	100
Persentase Masterplan Prasarana Wilayah dan Pengelolaan SDA tersusun	$\frac{1}{5}$	20	$\frac{1}{5}$	20	100%	$\frac{5}{5}$	100
% Master plan prasarana wilayah dan pengelolaan sumber daya alam yang Digunakan untuk Perencanaan	$\frac{1}{5}$	20	$\frac{1}{5}$	20	100%	$\frac{5}{5}$	100
Persentase Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah Yang Dilaksanakan	$\frac{9}{9}$	100	$\frac{9}{9}$	100	100%	$\frac{9}{9}$	100
Persentase Penelitian dan Pengembangan yang Dilakukan	$\frac{1}{5}$	20	$\frac{1}{5}$	20	100%	$\frac{5}{5}$	100
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Sistematis	$\frac{2}{2}$	100	$\frac{2}{2}$	100	100%	$\frac{2}{2}$	100
Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	$\frac{7}{7}$	100	$\frac{7}{7}$	100	100%	$\frac{7}{7}$	100

Meningkatnya Pelasanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	$\frac{13}{13}$	100	$\frac{13}{13}$	100	100%	$\frac{13}{13}$	100
Terselenggaranya Fasilitas Kerjasama Kemitraan	1	20	1	20	100%	5	100
Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor / Bidang Usaha Unggulan Tiap Tahun	$\frac{1}{5}$	20	$\frac{1}{5}$	20	100%	$\frac{5}{5}$	100
Σ Investasi Non Fasilitas	$\frac{220}{200}$	110	$\frac{846}{200}$	423	100%	$\frac{300}{200}$	150
Persentase Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi tersusun	$\frac{1}{8}$	12,5	$\frac{1}{8}$	12,5	100%	$\frac{8}{8}$	100
Tersedianya Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada		Ada			Ada	
Tersedianya Buku PDRB Kabupaten	Ada		Ada			Ada	
% data / informasi yg digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan	$\frac{2}{2}$	100	$\frac{2}{2}$	100	100%	$\frac{2}{2}$	100

C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014 (LAMPIRAN)

III. E. AKUNTABILITAS ANGGARAN

Pelaksanaan Kegiatan Bappeda Kabupaten Bondowoso telah dilaksanakan dengan realisasi fisik mencapai 100 % dan realisasi pencairan keuangan sebesar Rp.9.253.377.762,- atau 93,68 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan)
 - a. Realisasi Fisik : 100 %
 - b. Realisasi Keuangan : Rp. 2.205.293.256,- (98,61 %)
2. Belanja Langsung (65 Kegiatan) :
 - a. Realisasi Fisik : 100 %
 - b. Realisasi Pencairan Keuangan : Rp. 7.048.084.506,- (92,24%)

Sehingga sisa akhir tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp.623.842.588,- yang terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung : Rp. 31.043.144,-
2. Belanja Langsung : Rp. 592.799.444,-

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM / KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

NO	NAMA KEGIATAN	BIAYA/ ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN s/d BULAN INI	KEMAJUAN		SISA ANGGARAN
				FISIK	KEUANG AN	
		(Rp.)	(Rp.)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Tidak Langsung	2.236.336.400	2.205.293.256	100%	98,61%	31.043.144
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	2.236.336.400	2.205.293.256	100%	98,61%	31.043.144
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	489.497.900	473.228.463	100%	96,68%	16.269.437
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	75.000.000	64.405.663	100%	85,87%	10.594.337
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19.200.000	19.200.000	100%	100%	-
3	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	21.350.000	21.350.000	100%	100%	-
4	Penyediaan alat tulis kantor	35.982.500	35.937.500	100%	99,87%	45.000
5	Penyediaan barang cetakan dan	43.149.900	43.099.900	100%	99,88%	50.000

	penggandaan					
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.037.500	7.035.000	100%	99,96%	2.500
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4.015.000	4.015.000	100%	100%	-
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000	2.000.000	100%	100%	-
9	Penyediaan makanan dan minuman	31.013.000	30.954.000	100%	99,81%	59.000
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	234.550.000	331.400	100%	97,78%	5.218.600
11	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	8.700.000	8.400.000	100%	96,55%	300.000
12	Penyediaan Informasi Hasil Aparatur Kepada Masyarakat	7.500.000	7.500.000	100%	100%	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	862.650.000	845.345.365	100%	97,99%	17.304.635
13	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	131.750.000	130.519.000	100%	99,07%	1.231.000
14	Pengadaan peralatan gedung kantor	306.050.000	291.340.000	100%	95,19%	14.710.000
15	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5.500.000	5.500.000	100%	100%	-
16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	113.147.000	112.839.365	100%	99,73%	307.635
17	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	11.475.000	11.475.000	100%	100%	-
18	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	294.728.000	293.672.000	100%	99,64%	1.056.000
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3.000.000	2.999.500	100%	99,98%	500
19	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.000.000	2.999.500	100%	99,98%	500
	Program pengembangan data/informasi	300.000.000	219.568.900	100%	73,19%	80.431.100
20	Penyusunan Kabupaten dan Kecamatan Dalam Angka	175.000.000	99.897.000	100%	57,08%	75.103.000
21	Penyusunan Profil Kabupaten	75.000.000	71.471.900	100%	95,30%	3.528.100
22	Pengembangan Data Publikasi	50.000.000	48.200.000	100%	96,40%	1.800.000

	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	341.035.550	326.044.650	100%	95,60%	14.990.900
23	Pemuktahiran (Up Date) Data Masyarakat Miskin	341.035.550	326.044.650	100%	95,60%	14.990.900
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	50.000.000	49.048.500	100%	98,10%	951.500
24	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	50.000.000	49.048.500	100%	98,10%	951.500
	Program Peningkatan Ilim Investasi dan Realisasi Investasi	335.000.000	310.208.500	100%	92,60%	24.791.500
25	Pengembangan Simpedal	35.000.000	35.000.000	100%	100%	-
26	Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dengan Usaha Kecil Menengah	50.000.000	39.491.000	100%	78,98%	10.509.000
27	Penyusunan RUPM	250.000.000	235.717.500	100%	94,29%	14.282.500
	Program Perencanaan Tata Ruang	435.000.000	413.046.130	100%	94,95%	21.953.870
28	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	160.000.000	147.401.130	100%	92,13%	12.598.870
29	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	275.000.000	265.645.000	100%	96,60%	9.355.000
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	200.000.000	197.085.500	100%	98,54%	2.914.500
30	Pengawasan pemanfaatan ruang	200.000.000	197.085.500	100%	98,54%	2.914.500
	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah	100.000.000	99.178.500	100%	99,18%	821.500
31	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	100.000.000	99.178.500	100%	99,18%	821.500
	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	220.107.000	159.507.325	100%	72,47%	60.599.675
32	Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	69.087.000	54.118.000	100%	78,33%	14.969.000
33	Penyebarluasan Informasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	151.020.000	105.389.325	100%	69,79%	45.630.675
	Program perencanaan pembangunan daerah	1.519.000.000	1.378.871.897	100%	90,77%	140.128.103

34	Penyusunan rancangan RKPD	180.000.000	163.223.097	100%	90,68%	16.776.903
35	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	150.000.000	129.704.000	100%	86,47%	20.296.000
36	Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	100.000.000	93.187.700	100%	93,19%	6.812.300
37	Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	150.000.000	137.946.450	100%	91,96%	12.053.550
38	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	137.500.000	114.245.700	100%	83,09%	23.254.300
39	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK	92.500.000	87.660.500	100%	94,77%	4.839.500
40	Penyusunan Rancangan KU dan PPAS	284.000.000	281.018.200	100%	98,95%	2.981.800
41	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program/Kegiatan SKPD	50.000.000	49.549.750	100%	99,10%	450.250
42	Finalisasi dan Sosialisasi RPJMD	200.000.000	193.171.500	100%	96,59%	6.828.500
43	Fasilitasi Monev RAD PPK	175.000.000	129.165.000	100%	73,81%	45.835.000
	Program perencanaan pembangunan ekonomi	243.000.000	231.626.698	100%	95,32%	11.373.302
44	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	95.000.000	89.570.298	100%	94,28%	5.429.702
45	Pendukung Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program/APP)	98.000.000	95.943.000	100%	97,90%	2.057.000
46	Penyusunan Rencana Aksi Daerah dan Monev Pembangunan Pangan dan Gizi	50.000.000	46.113.400	100%	92,23%	3.886.600
	Program perencanaan sosial dan budaya	917.257.500	865.182.920	100%	94,32%	52.074.580
47	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	100.000.000	97.550.120	100%	97,55%	2.449.880
48	Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	233.000.000	218.513.250	100%	93,78%	14.486.750
49	Pendukung Kegiatan USAID	67.000.000	61.536.650	100%	91,85%	5.463.350
50	Pendukung Kegiatan UNICEF	55.000.000	52.805.200	100%	96,01%	2.194.800
51	Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)	100.000.000	94.247.100	100%	94,25%	5.752.900
52	Tim Pembina Kabupaten Sehat	102.257.500	97.919.200	100%	95,76%	4.338.300

53	Pendamping Kegiatan Quick Wins	60.000.000	58.350.400	100%	97,25%	1.649.600
54	Rencana Aksi Daerah Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)	100.000.000	91.966.500	100%	91,97%	8.033.500
55	Analisa Pengembangan SMK Berbasis Unit Produksi	100.000.000	92.294.500	100%	92,29%	7.705.500
	Program perancangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	885.336.000	820.902.358	100%	92,72%	64.433.642
56	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	100.000.000	98.403.840	100%	98,40%	1.596.160
57	Pendamping dan Penunjang Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP/Parallel	90.000.000	84.034.300	100%	93,37%	5.965.700
58	Penyusunan Masterplan Prasarana Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	250.000.000	236.033.000	100%	94,41%	13.967.000
59	Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	145.000.000	129.673.900	100%	89,43%	15.326.100
60	Water Resources and Irrigation Sector Management Program 2 (WISMP 2)	220.336.000	199.614.818	100%	90,60%	20.721.182
61	Koordinasi Pelaksanaan P2D2 DAK Infrastruktur	80.000.000	73.142.500	100%	91,43%	6.857.500
	Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	740.000.000	656.239.300	100%	88,68%	83.760.700
62	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan	60.000.000	40.321.500	100%	67,20%	19.678.500
63	Penerbitan Buletin Warta Litbang	40.000.000	38.155.000	100%	95,39%	1.845.000
64	Kajian Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di UMKM	150.000.000	146.955.000	100%	97,97%	3.045.000
65	Fasilitasi Dewan Riset Daerah	490.000.000	430.807.800	100%	87,92%	59.192.200
	Jumlah Belanja Langsung	7.640.883.950	7.048.084.506	100%	92,24%	592.799.444
	JUMLAH SELURUHNYA	9.877.220.350	9.253.377.762	100%	93,68%	623.842.588

BAB IV

PENUTUP

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkedudukan sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bondowoso dan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kabupaten Bondowoso .

Dengan melihat gambaran capaian kinerja program serta aspek keuangan pada Bab III maka dapat disimpulkan bahwa Bappeda Kabupaten Bondowoso secara umum dapat mencapai target yang ditetapkan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014 ini disusun sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Bondowoso Tahun 2014.

Bondowoso, Pebruari 2015

KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO

Ir.H.MOHAMMAD ERFAN, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19580222 198603 1 013